

Penyimpangan Prinsip Kerjasama dan Fungsi Tuturan dalam Gelar Wicara Mata Najwa Episode “Jokowi Diuji Pandemi”

Evi Martika D. Kasiahe¹
Universitas Katolik De La Salle Manado

ekasiahe@unikadelasalle.ac.id

Abstract

The language usage in the conversation between host and guests in the Mata Najwa Talkshow Episode “Jokowi Diuji Pandemi” becomes one of the interesting aspects to be researched. The words “mudik” and “pulang kampung” in the episode of “Jokowi Diuji Pandemi” have become a hot topic in the public. Either Jokowi or Najwa have their own intention (implicature) through what they were saying. This research utilizes pragmatic study that aims to describe the violation of cooperative principle and speech function that may cause implicature. This research utilizes the observation method with recording technique. The data analysis is conducted based on the pragmatic theory of Grice (1975) and Searle (1969). After research, it is found three flouting the cooperative principle namely, flouting maxim of manner, maxim of quantity, and maxim of relevanc. Also found four of functions of speech namely, representative speech, expressive speech, commissive speech, and directive speech.

Keywords: cooperative principle, speech function, talkshow, pragmatic, flouting.

Intisari

Penggunaan bahasa dalam percakapan antara pewara dan narasumber pada Gelar Wicara Mata Najwa Episode “Jokowi Diuji Pandemi” menjadi salah satu aspek yang menarik untuk diteliti. Kata ‘mudik’ dan ‘pulang kampung’ dalam episode “Jokowi Diuji Pandemi” menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Tentu saja baik Jokowi maupun Najwa punya maksud tersendiri (implikatur) melalui apa yang mereka ungkapkan. Penelitian ini menggunakan kajian pragmatik bertujuan untuk mendeskripsikan pelanggaran prinsip kerja sama dan fungsi tuturan yang mengakibatkan munculnya implikatur. Penelitian ini menggunakan metode simak dengan teknik catat. Analisis data dilakukan berdasarkan teori pragmatik dari Grice (1975) dan Searle (1969). Setelah dilakukan penelitian, ditemukan ada tiga bentuk pelanggaran prinsip kerjasama yaitu pelanggaran terhadap maksim cara, maksim kuantitas, dan maksim relevansi. Ditemukan juga empat fungsi tuturan yaitu tuturan representatif, tuturan ekspresif, tuturan komisif, dan tuturan direktif.

Kata Kunci: prinsip kerjasama, fungsi tuturan, gelar wicara, pragmatik, penyimpangan.

Pendahuluan

Saat proses komunikasi berlangsung sering kali terjadi kesalahpahaman antara penutur dan mitra tutur. Kesalahpahaman ini biasanya disebabkan karena penutur memberikan informasi yang tidak sesuai dengan informasi yang diharapkan oleh mitra tutur, sehingga sangat penting untuk

mengetahui maksud dari mitra tutur, tidak saja maksud yang tersurat tetapi juga maksud yang tersirat. Untuk memahami maksud lawan bicara dalam sebuah pembicaraan, dibutuhkan kemauan dan usaha untuk memahami bahan pembicaraan agar terjadi komunikasi timbal balik, yang dapat memenuhi kebutuhan informasi baik dari si penutur maupun mitra tutur.

Penelitian ini dilakukan untuk mengkaji maksud penutur lebih dari sekadar apa yang diungkapkan secara langsung dalam sebuah percakapan, tetapi juga untuk mengungkap fakta kebahasaan tentang maksud dari sebuah tuturan yang melebihi dari apa yang diungkapkan secara lahiriah (Levinson 1987). Seorang penutur mungkin memaksudkan atau menyiratkan sebuah maksud berbeda dari apa yang diungkapkan (Grice 1975), belum lagi jika konteks pembicaraan adalah sebuah acara di TV yang berupa *talk show* atau gelar wicara yang biasanya memang bertujuan menggali informasi dari seorang narasumber melalui pertanyaan-pertanyaan. Penelitian ini menjadi begitu penting, karena tidak semua orang memahami dan mengerti maksud tersirat dalam percakapan antara pewara dan narasumber, ada informasi lebih yang akan didapatkan oleh penonton jika dapat memahami maksud-maksud tersirat dari percakapan yang terjadi.

Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan pelanggaran prinsip kerjasama dan fungsi tuturan dalam Gelar Wicara Mata Najwa Episode “Jokowi Diuji Pandemi” dengan menggunakan teori pragmatik dari Grice dan Searle. Kiranya penelitian ini dapat bermanfaat bagi masyarakat untuk lebih memahami maksud dari tuturan-tuturan dalam Gelar Wicara Mata Najwa dan juga untuk pengembangan ilmu pragmatik khususnya pada teori-teori yang berhubungan dengan prinsip kerjasama maupun fungsi tuturan.

Beberapa penelitian tentang implikatur yang pernah dilakukan di antaranya adalah “Implikatur Percakapan dalam *Talkshow* Hitam Putih di Trans 7” oleh Haliko (2017), “Implikatur Percakapan dalam *Stan Up Comedy* 4” oleh Wahyuningsih dan Rafli (2017), “Implikatur Percakapan dalam *Talkshow* Mata Najwa di Metro TV” oleh Handayani dkk. (2014), “Implikatur Percakapan dalam Gelar Wicara Sentilan Sentilun di Metro TV” oleh Astuti (2017). Umumnya penelitian-penelitian tentang implikatur yang telah dilakukan memiliki objek kajian yang sama yaitu acara atau program TV. Tujuannya juga sama yaitu menggali maksud-maksud tersembunyi dalam percakapan pada acara atau program TV tersebut. Walaupun sering diteliti tetapi kajian tentang implikatur tetap menarik untuk diteliti dan dianalisis. Kajian implikatur pada Mata Najwa juga telah muncul pada satu judul penelitian sebelumnya, meski sama-sama

memilih Mata Najwa sebagai objek kajian tetapi episode yang dikaji adalah episode yang berbeda. Penelitian-penelitian terdahulu, secara khusus memberi perhatian pada bentuk dan fungsi implikatur yang ditemukan dalam suatu percakapan. Tidak banyak penelitian tentang implikatur yang juga turut mengkaji penyimpangan dari prinsip percakapan, baik prinsip kerjasama maupun prinsip kesantunan padahal implikatur justru muncul karena telah terjadi penyimpangan prinsip percakapan. Inilah kebaruan yang ditawarkan dalam penelitian ini, yang selama ini jarang mendapat perhatian untuk dikaji secara bersama dalam sebuah penelitian.

Selain itu yang menjadi objek kajian pada penelitian ini adalah Program Acara Mata Najwa dengan episode “Jokowi Diuji Pandemi”. Episode ini menjadi begitu penting dan istimewa selama pandemi Covid-19 berlangsung. Lewat episode ini dapat diketahui perihal kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam menghadapi pandemi. Tidak semua orang dapat memahami dengan mudah maksud-maksud yang disampaikan oleh Bapak Presiden, karena pertanyaan yang diajukan oleh Najwa tidak langsung dijawab dengan jelas, tetapi kadang didahului argumen, contoh-contoh, pernyataan-pernyataan tertentu atau bahkan disanggah dengan pertanyaan. Karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengungkap maksud dari jawaban narasumber. Penelitian ini menggunakan kajian bahasa tataran pragmatik khususnya tentang penyimpangan prinsip kerjasama dan fungsi tuturan yang berkorelasi dengan munculnya implikatur percakapan.

Maksud tersirat di balik sebuah ungkapan ditelusuri oleh salah sub disiplin ilmu bahasa yang disebut pragmatik. Pragmatik secara khusus menelusuri makna suatu tuturan bukan secara internal berdasarkan bentuk lingual atau struktur kebahasaanya tetapi secara eksternal dalam situasi (*speech situations*) atau konteks tertentu (Leech 1983). Selain itu dalam pragmatik ditelusuri juga kemampuan pemakai bahasa menghubungkan serta menyerasikan kalimat-kalimat dan konteks secara tepat (Levinson dalam Tarigan, 1986:33). Dalam pragmatik diselidiki bagaimana sebuah konteks dapat berpengaruh terhadap makna suatu ungkapan, sehingga sebelum penutur bertutur perlu diketahui siapa mitra tuturnya, dimana mereka bicara dan dalam waktu serta keadaan seperti apa mereka bicara. Lewat kajian pragmatik dapat diketahui makna sebenarnya sesuai dengan interpretasi makna yang dimaksudkan penutur.

Implikatur dan tindak tutur merupakan salah satu pokok yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan bagian sentral dalam pragmatik (Searle, 1969:19). Implikatur diartikan sebagai makna tambahan atau informasi, lebih dari apa yang diungkapkan. Implikatur menjadi sebuah

penghubung antara apa yang dikatakan dengan apa yang diimplikasikan oleh penutur. Implikatur bermaksud menyatakan apa yang dimaksudkan oleh penutur tetapi tidak dinyatakan secara eksplisit dalam tuturan. Dalam sebuah percakapan akan muncul implikatur apabila terjadi pelanggaran terhadap prinsip-prinsip dasar sebuah percakapan baik secara sengaja maupun tidak sengaja, (Rustono 1999). Dalam studi pragmatik prinsip-prinsip yang mengatur kaidah-kaidah sebuah percakapan disebut maksim.

Ada dua prinsip yang mengatur jalannya sebuah percakapan yaitu prinsip kerjasama dan prinsip kesantunan. Dalam prinsip kerjasama setiap penutur harus mematuhi empat maksim yaitu maksim kuantitas, maksim kualitas, maksim relevansi dan maksim cara (Grice 1975). Penutur yang dalam bertutur menyalahi atau tidak mematuhi ketentuan maksim ini berarti melakukan penyimpangan maksim. Penyimpangan maksim dalam sebuah percakapan biasanya disebabkan oleh adanya maksud dan tujuan tertentu dari dua atau lebih orang yang terlibat dalam sebuah percakapan. Penyimpangan maksim sering tidak tampak sebagai sebuah masalah untuk mereka yang sedang bercakap, karena biasanya mereka saling mengerti dan memahami maksud masing-masing meski dalam penyimpangan prinsip percakapan. Tetapi kerap kali dan menimbulkan kesalahpahaman bagi pihak ketiga atau pendengar yang tidak terlibat langsung dalam percakapan, di sinilah kajian pragmatik tentang penyimpangan maksim menjadi penting untuk mengungkap keterkaitan atau hubungan sebuah percakapan yang sebenarnya secara literal tampak tidak berhubungan.

Kajian pragmatik tentang penyimpangan maksim dan fungsi tuturan yang dikemas dalam tulisan ini, memilih gelar wicara Mata Najwa episode “Jokowi Diuji Pandemi” sebagai objek penelitian. Mata Najwa disiarkan di Metro TV, dan merupakan salah satu gelar wicara yang punya popularitas yang tinggi dan banyak diminati masyarakat. Tema-tema yang dihadirkan adalah tema-tema aktual yang terjadi di Indonesia sehingga selalu menarik untuk disimak. Belum lagi narasumber-narasumber yang dihadirkan biasanya adalah tokoh-tokoh penting dengan kompetensi, keahlian, dan kedudukan masing-masing. Najwa Shihab sebagai pewara pada acara ini mampu mengorek informasi sedalam-dalamnya dari narasumber, dengan cara bertanya dan menanggapi yang khas, tajam, kritis tetapi juga hati-hati. Narasumber kadang dibuat serba salah dalam menanggapi, antara memberikan jawaban yang tepat dan menjaga ketelitian dalam informasi maupun pandangan yang disampaikan. Dalam konteks inilah sering terjadi pelanggaran prinsip kerja sama dan muncul maksud-maksud tersirat.

Menurut Grice implikatur percakapan adalah proposisi atau pernyataan implisit yaitu sesuatu yang diartikan, disiratkan atau dimaksudkan oleh penutur tetapi berbeda dengan apa yang dikatakannya (Grice dalam Rustono 1999:82). Grice (1975) juga menjelaskan bahwa ada hubungan erat antara implikatur dan prinsip kerjasama. Melalui prinsip kerjasama diatur bagaimana sebuah tuturan harus berlangsung sehingga penutur dan mitra tutur dapat langsung saling memahami maksud tuturan. Jika prinsip kerjasama ini tidak dipatuhi, maka akan muncul maksud tersirat yang tidak dinyatakan secara eksplisit dalam tuturan. Inilah yang disebut sebagai implikatur. Untuk dapat memahami maksud implikatur, penutur dan mitra tutur harus mengerti konteks, yaitu pemahaman dan latarbelakang yang sama-sama diketahui baik oleh penutur maupun mitra tutur (Leech, 1993:20).

Setiap tuturan memiliki fungsi masing-masing termasuk tuturan berimplikatur. Searle (dalam Leech 1993) membedakan tuturan berdasarkan fungsinya ke dalam lima jenis tuturan yaitu tuturan representatif, direktif, ekspresif, komisif, dan deklaratif. Klasifikasi lima jenis tuturan didasarkan pada bentuk dan fungsinya masing-masing. Tuturan representatif adalah tuturan yang berisi kebenaran, tuturan ini dapat berupa pernyataan, tuntutan, pengakuan, penunjukkan, laporan dan pemberian kesaksian atau informasi. Rustono (2000: 79) menambahkan bahwa tuturan representatif bersifat mengikat penutur atas informasi yang diucapkan. Tuturan direktif dimaksudkan agar mitra tutur melakukan tindakan, sesuai yang dimaksudkan dalam tuturan dapat berupa permintaan, ajakan, perintah, permohonan, tantangan. Efek yang ditimbulkan adalah berupa tindakan (Taringan, 1986: 47).

Sedangkan tuturan ekspresif yang menggambarkan keadaan psikis penutur dapat berupa keluhan, ucapan selamat, sanjungan, pujian, kritikan. Tuturan ekspresif erat hubungannya dengan perasaan yang terungkap dalam tindakan seperti permintaan maaf atau keluhan (Syamsyudin, 1988: 97). Selanjutnya tuturan komisif, tuturan ini bersifat mengikat penutur untuk melakukan apa yang diucapkannya seperti, bersumpah, berjanji, menyatakan kesanggupan atau berkaul. Penutur bertanggungjawab untuk melakukan tindakan sebagaimana yang disebutkan dalam tuturan. Terakhir adalah tuturan deklaratif yang menuntut penutur menciptakan atau membawa sesuatu yang baru misalnya, status atau keadaan. Jenis tindak tutur ini berupa keputusan, pembatalan, larangan, ijin, pemberian ampun atau maaf. Tuturan deklaratif menurut Searle (dalam Rohmadi, 2010: 35) adalah tuturan yang dimaksudkan oleh penuturnya untuk menciptakan hal (status, keadaan, dan sebagainya) yang baru.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan adalah tuturan antara pewara dan narasumber pada Gelar Wicara Mata Najwa Episode “Jokowi Diuji Pandemi”. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode simak dengan teknik catat (Mahsun, 2005: 92-93). Metode simak dilakukan dengan menyimak tuturan pada Gelar Wicara Mata Najwa Episode “Jokowi Diuji Pandemi” melalui kanal Youtube Resmi dari Najwa Sihab. Sementara teknik catat dilakukan dengan membuat transkrip dari tuturan-tuturan yang telah disimak. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode agih (Sudaryanto, 2015:18). Metode agih dilakukan dengan melakukan distribusi terhadap satuan-satuan bahasa dari transkrip yang telah dibuat, adapun proses distribusi satuan bahasa ini didasarkan pada teori dasar pragmatik dari Grice dan Searle. Berdasarkan hasil analisis data yang dilakukan data yang mengandung implikatur kemudian disajikan secara deskriptif dalam bentuk kata-kata. Analisis data yang dilakukan, pada akhirnya mendeskripsikan dua hal yaitu pelanggaran prinsip kerja sama dan fungsi tuturan.

Hasil dan Pembahasan

Tuturan yang dideskripsikan pada bagian hasil dan pembahasan dalam tulisan diambil dari Gelar Wicara Mata Najwa Episode “Jokowi Diuji Pandemi”. Tidak semua tuturan dalam Gelar Wicara tersebut dianalisis, hanya dipilih jenis tuturan yang mengandung penyimpangan prinsip kerjasama. Jenis tuturan tersebut kemudian dianalisis berdasarkan fungsi tuturannya. Berikut ini uraiannya.

1. Konteks Tutur 1

Najwa sedang mengonfirmasi Pak Jokowi tentang pejabat publik yang terkesan mengentengkan pandemi Covid-19 pada awal pandemi merebak. Kesan mengentengkan tersebut diperkuat dengan fakta pernyataan Menteri Kesehatan. Mitra tutur bertujuan mengonfirmasi benar atau tidak bahwa ada kesan mengentengkan.

Najwa (Mt.) : Di awal Bapak bilang ini keputusan yang sulit diambil, apapun pasti ada resikonya karenanya Bapak juga paham ada banyak kritikan-kritikan yang masuk. Kritikan-kritikan itu antara lain, saya ingin minta tanggapan Bapak. Ee.. misalnya ketua umum PMI Pak, Pak Jusuf Kalla menilai langkah-langkah pemerintah dalam litagasi pandemi ini kurang cepat dan kurangtegas, Januari sudah muncul

virus, tapi Maret baru pemerintah serius mengambil langkah. Ada juga anggapan di awal-awal pandemi ini Pak, banyak pejabat publik yang justru mengentengkan masalah. Menteri Kesehatan Terawan misalnya, yang bilang ini flu biasa akan sembuh sendiri, ee... cukup. Jadi..jadi ada kesan menganggap ini bukan masalah yang serius. *Apakah betul kesan itu?*

Jokowi (Pn.) : Tadi di awal kan sudah saya sampaikan, bahwa *ini virus berbahaya sangat berbahaya* tetapi bisa dicegah dan bisa dihindari. Tapi kita tidak ingin membuat kebijakan itu dengan cara grusa-grusu yang ini dinilai oleh publik lamban. Mungkin lamban di situ. Membuat publik tenang itu tidak dilihat sebagai sebuah keputusan, itu sudah keputusan. Membuat publik agar tidak panik, itu keputusan. Itu tidak dilihat sebagai sebuah keputusan. Anunya di situ, agak.... agak berbedanya di situ.

Jawaban yang diberikan oleh penutur tidak mengonfirmasi secara langsung dengan mengatakan “benar” atau “tidak” ada kesan mengentengkan. Ungkapan “*ini virus berbahaya, sangat berbahaya*” sebenarnya merupakan bentuk konfirmasi “tidak” terhadap mitra tutur. Untuk mengonfirmasi benar tidaknya kesan mengentengkan yang ditanyakan oleh mitra tutur, penutur memberikan penjelasan soal pandangannya tentang virus dan langkah penanganan yang telah dibuat. Berdasarkan prinsip kerja sama Grice tuturan ini melanggar maksim kuantitas karena penutur memberikan informasi lebih dari apa yang dibutuhkan mitra tutur. Sebagaimana aturan maksim kuantitas bahwa kontribusi yang diberikan penutur harus sesuai dengan yang diperlukan mitra tutur (Grice, 1975). Hal ini dilakukan penutur untuk menunjukkan bahwa dirinya sebagai Presiden jelas sekali melihat Covid-19 sebagai virus berbahaya dan langsung mengambil kebijakan penanganan, sama sekali tidak mengentengkan virus. Kesan mengentengkan hanya muncul karena ada perbedaan pandangan antara pemerintah dan publik dalam hal penanganan pandemi Covid-19. Tuturan ini dikategorikan sebagai tuturan representatif karena berisi kesaksian dan informasi.

2. Konteks Tutur 2

Najwa sedang meminta penilaian Pak Jokowi mengenai Kinerja Menteri Kesehatan Pak Terawan terkait penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. Mitra tutur bertujuan meminta penutur memberikan penilaian terhadap kinerja Menteri Kesehatan.

Najwa (Mt.) : *To the point* Pak Jokowi, *bagaimana penilaian Bapak* atas kinerja Menteri Kesehatan Pak Terawan?

Jokowi (Pn.) : *Tidak ada yang sempurna di dunia ini*, tidak ada yang sempurna. Jadi kalau ada yang mengatakan ee..., masyarakat ada yang kecewa ya saya rasa itu wajar, wajar. *Setiap pekerjaan ada yang menilai, setiap keputusan ada resikonya.*

Penutur tidak memberikan penilaian terhadap kinerja Menteri Kesehatan tetapi menyampaikan petuah “*tidak ada yang sempurna di dunia ini*” dan “*setiap pekerjaan ada yang menilai, setiap keputusan ada resikonya*”. Ungkapan ini sebenarnya menyiratkan isi hati penutur mengenai kinerja Menteri Kesehatan yang kerap disorot oleh masyarakat serentak juga pengakuan bahwa ungkapan “*tidak ada yang sempurna*” juga berlaku bagi kinerja Menteri Kesehatan. Berdasarkan prinsip kerja sama Grice tuturan yang diucapkan oleh penutur melanggar maksim cara, sebab penutur memberikan pernyataan yang samar dan taksa terhadap apa yang ditanyakan oleh mitra tutur, sehingga apa yang diungkapkan penutur tidak mudah dipahami oleh mitra tutur (Grice, 1975). Tuturan ini dikategorikan sebagai tutur ekspresif karena mengekspresikan atau mengungkapkan apa yang menjadi isi hati dari penutur tetapi juga memberi penilaian pada apa yang dituturkan (Searle dalam Manaf, 2011:212).

3. Konteks Tutur 3

Najwa memberikan pernyataan bahwa dalam keputusan-keputusan yang diambil pemerintah di lapangan ada keputusan yang merugikan satu sama lain. Kemudian ditanggapi oleh Pak Jokowi. Mitra tutur bermaksud meminta penegasan penutur bahwa dari keputusan-keputusan yang diambil, ada keputusan yang merugikan satu sama lain.

Najwa (Mt.) : Tapi dalam prakteknya memang ada keputusan-keputusan di lapangan, yang harus diambil yang akhirnya *merugikan satu sama lain*.

Jokowi (Pn.) : *Yah itu pilihan-pilihan yang ada dua pilihan, yang buruk-buruk semua*, nggak akan memuaskan semua orang karena pilihannya buruk-buruk semuanya. Kalau ada pilihan baik dan pilihan buruk, itu bisa dipilih ini pilihannya buruk-buruk semuanya.

Penutur tidak langsung menanggapi benar atau tidak pernyataan mitra tutur tetapi memberi penjelasan perihal pilihan-pilihan buruk yang dihadapi oleh pemerintah ketika hendak menjatuhkan keputusan. Pernyataan penutur secara tidak langsung mengungkapkan bahwa jika keputusan yang diambil pemerintah pada akhirnya ternyata merugikan, itu sudah merupakan keputusan terbaik yang diambil dari pilihan-pilihan yang buruk. Tuturan yang diucapkan oleh penutur melanggar maksim relevansi karena penutur memberikan tanggapan tentang pilihan

padahal pernyataan mitra tutur bukan mengenai pilihan tetapi tentang keputusan yang merugikan. Meskipun jika ditelusuri ada hubungan antara pilihan yang dihadapi dan pengambilan keputusan tetapi tidak dinyatakan secara eksplisit oleh penutur dalam tuturannya. Jenis tuturan ini dikategorikan sebagai jenis tuturan representatif sebab berisi pernyataan dan informasi, dan dengan jelas menyatakan apa yang diyakini oleh penutur (Searle, 1976) bahwa keputusan yang diambil sudah merupakan keputusan terbaik walaupun tetap saja dianggap sebagai keputusan yang merugikan satu sama lain.

4. Konteks Tutur 4

Najwa sedang bertanya kepada Pak Jokowi perihal keputusan pengoperasian KRL yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan, apakah benar faktor kesehatan menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam mengambil keputusan tersebut. Mitra tutur bermaksud meminta konfirmasi apakah benar faktor kesehatann menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam pengambilan keputusan terkait pengoperasian KRL.

Najwa (Mt.) : Ee... saya mau kasih contoh satu lagi Bapak soal ee... KRL, karena belum lama ini kepala daerah Jabodetabek ee... kompok meminta supaya KRL dihentikan operasinya sampai tanggal 28 April karena dalam prakteknya masih terjadi penumpukan penumpang, sehingga protokol kesehatan itu sulit untuk dijaga. Tetapi kemudian, Kementerian Perhubungan menolak permintaan itu. Apakah memang Bapak Presiden menyetujui keputusan ini, dan *apakah memang itu Bapak lihat sudah mempertimbangan faktor kesehatan*, seperti yang tadi Bapak katakan merupakan pertimbangan utama Bapak Presiden?

Jokowi (Pn.) : *Kalau daerah-daerah mau mempersiapkan dan mau menanggung dari keputusan yang diminta itu, maka kita berikan*. Artinya pekerja harian yang naik KRL, buruh-buruh harian yang naik KRL, pedagang-pedagang asongan yang mendapatkan nafkah dari naik KRL, karena naik KRL itu sangat murah sekali itu ditanggung oleh mereka, dijamin oleh mereka dengan bantuan sosial yang baik, saya hentikan.

Penutur menjawab pertanyaan mitra tutur dengan menjelaskan alasan tidak disetujuinya penghentian pengoperasian KRL, bukan konfirmasi bahwa benar faktor kesehatan menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam pengambilan keputusan untuk tidak menghentikan operasi KRL. Lewat tuturan “*kalau daerah-daerah mau mempersiapkan dan mau menanggung dari keputusan yang diminta itu, maka kita berikan*” penutur hendak menyampaikan bahwa ada hal yang perlu diperhatikan yakni kesejahteraan sosial para pengguna KRL dan keputusan untuk tetap mengoperasikan KRL diambil dengan memperhatikan hal tersebut. Apa yang dituturkan

oleh penutur melanggar maksim kuantitas karena memberikan jawaban melebihi jawaban yang diminta atau yang dikehendaki oleh mitra tutur. Tuturan yang disampaikan oleh penutur dikategorikan sebagai jenis tuturan komisif karena berisi janji Pak Jokowi untuk menyanggupi penghentian operasi KRL jika pemerintah daerah dapat menjamin kesejahteraan sosial pengguna KRL. Karena itu penutur terikat pada janji yang dituturkannya (Searle, 1976).

5. Konteks Tutur 5

Najwa sedang memberikan pertanyaan lanjutan sekaligus memastikan kepada Pak Jokowi apakah memang jaminan kesejahteraan sosial bagi pengguna KRL ada di tangan pemerintah daerah. Mitra tutur bertujuan mengonfirmasi kepada penutur bahwa tanggungjawab untuk memberikan jaminan kesejahteraan sosial bagi pengguna KRL memang ada di tangan pemerintah daerah.

Najwa (Mt.) : *Tapi tanggungjawab itu ada di pemerintah daerah?*

Jokowi (Pn.) : *Lah.. karena kan mereka meminta. Mestinya bukan hanya meminta tapi menyiapkan juga bantalan social safety net jaring pengaman sosialnya dipastikan dulu. Jangan hanya meminta kemudian dibiarkan, ya sudah masyarakat dibiarkan cari sendiri-sendiri. Nggak bisa seperti itu, itu yang saya nggak bisa. Bukan masalah eh.. apanya.. kebijakannya, tidak bukan itu. Nggak apa-apa, dihentikan nggak apa-apa. Tapi ini siapa mereka, siapkan dulu bantuan sosial untuk mereka atau kalau tidak, saya kemarin menyampaikan kalau ada persiapan bus, agak tidak berdesak-desakan di KRL sehingga apa... tapi busnya diisi separuh saja, sehingga ada apa... ada *physical distancing* di situ, sehingga ini memberikan solusi, kalau kebijakan yang tidak memberikan solusi, itu akan memunculkan masalah yang baru.*

Penutur memberikan jawaban bahwa mereka yang meminta penghentian operasi KRL mestinya juga menyiapkan pengaman sosial. Mereka yang meminta dalam hal ini adalah pemerintah daerah. Penutur secara tidak langsung memberikan jawaban “ya” kepada mitra tutur bahwa tanggungjawab memang ada di tangan pemerintah daerah karena pemerintah daerah yang meminta penghentian operasi KRL. Penutur melanggar maksim kuantitas karena memberikan informasi lebih dari yang dibutuhkan oleh mitra tutur, hal ini dilakukan penutur dalam kapasitas beliau sebagai kepala negara, agar masyarakat mengetahui ada begitu banyak hal yang menjadi pertimbangan pemerintah sebelum akhirnya mengambil sebuah keputusan. Penutur sempat menuturkan “*nggak bisa seperti itu, itu yang saya nggak bisa*” tuturan ini merupakan jenis tuturan ekspresif karena menggambarkan keluhan penutur terhadap keputusan yang diambil

tanpa memperhatikan kesejahteraan masyarakat sehingga memunculkan masalah baru. Melalui tuturan ekspresif terungkap sikap psikologis penutur (Searle dalam Taringan, 2009: 43).

6. Konteks Tutur 6

Najwa sedang menjelaskan bahwa kebijakan pemerintah untuk melarang mudik sebenarnya sudah terlambat karena sudah 900 ribu orang sudah mudik, kemudian bertanya apakah keputusan melarang mudik dikeluarkan karena telah melihat situasi di lapangan bahwa sudah banyak orang yang mudik dan tersebar di daerah-daerah. Mitra tutur memberikan informasi kepada penutur bahwa keputusan untuk melarang mudik telah terlambat karena sebelum keputusan dikeluarkan banyak orang sudah mudik.

Najwa (Mt.) : Tapi yang dikhawatirkan, *bahkan masalah itu sudah timbul pak*. Karena data dari Kemenhub sudah hampir 1 juta orang curi *start* mudik, sudah 900 ribu orang yang sudah mudik dan yang sudah tersebar ke berbagai daerah. *Apakah ini memang, keputusan melarang itu yang baru akan dikeluarkan melihat situasi*, tapi faktanya sudah terjadi penyebaran orang di daerah bapak.

Jokowi (Pn.) : *Kalau itu bukan mudik, itu namanya pulang kampung*. Memang kerja di Jabodetabek di sini sudah tidak ada pekerjaan yah mereka pulang, karena anak istrinya ada di kampung.

Penutur tidak menjawab pertanyaan mitra tutur tetapi menjelaskan bahwa mereka yang disebut oleh mitra tutur ‘mudik’, dalam pemahaman penutur ‘bukan mudik’ melainkan ‘pulang kampung’. Secara implisit penutur menjawab pernyataan mitra tutur bahwa keputusan melarang orang untuk mudik dikeluarkan bukan karena telah melihat situasi di lapangan. Sebab situasi yang terjadi di lapangan berhubungan dengan mereka yang ‘pulang kampung’ dalam pemahaman penutur, bukan dengan mereka yang ‘mudik’ seperti yang dipahami oleh mitra tutur. Tuturan penutur ini melanggar maksim relevansi karena penutur memberikan jawaban yang tidak relevan dengan pertanyaan mitra tutur. Sebab dalam aturan maksim relevansi, penutur dalam tuturannya harus memberikan kontribusi yang relevan dengan masalah yang dibicarakan (Grice, 1975: 46). Mitra tutur tidak bertanya apakah yang mereka telah pulang ke kampung disebut mudik atau pulang kampung, sehingga jawaban penutur tidak relevan dengan pertanyaan mitra tutur. Tuturan penutur dikategorikan sebagai jenis tuturan representatif karena penutur memberikan pernyataan mengenai perbedaan mudik dan pulang kampung.

7. Konteks Tutur 7

Najwa sedang menjelaskan kepada Pak Jokowi bahwa istilah mudik dan pulang kampung memiliki pengertian yang sama dan akibat yang sama. Mitra tutur memberikan penjelasan bahwa mudik dan pulang kampung hanya berbeda soal waktu tetapi sama-sama dapat menularkan virus kepada sanak saudara yang berada di kampung halaman. Hal ini disampaikan Najwa agar ada kesamaan persepsi dengan Pak Jokowi.

- Najwa (Mt.) : Tapi itu kan hanya perbedaan *timing* Bapak Presiden, tapi aktivitasnya sama. Mereka pulang dan kemungkinan membawa virus ke rumah itu sama.
- Jokowi (Pn.) : *Coba dilihat juga di lapangan*, ini lapangan yang kita lihat, di Jakarta mereka menyewa ruang 3x3 atau 3x4 isinya 8 orang 9 orang. Mereka di sini tidak bekerja. Lebih berbahaya mana, di sini di dalam ruangan, dihuni sembilan delapan orang atau pulang ke kampung, tetapi di sana juga sudah disiapkan isolasi dulu oleh desa. Saya kira sekarang semua desa sudah menyiapkan isolasi ini, yang pulang dari Jakarta. *Lebih bahaya mana?* Saya kira kita harus melihat lebih detail lapangannya, harus lebih detail angka-angkanya.

Penutur memberikan penjelasan lanjutan terkait mereka yang ‘pulang kampung’. Dalam pengertian penutur bahwa mereka yang pulang kampung lebih dapat meminimalisir potensi tertular virus Corona dibandingkan tetap tinggal di Jakarta pada ruang sempit dan berdesak-desakan sementara mereka tidak lagi bekerja dan keluarga mereka ada di kampung. Jadi karena pemahaman penutur tersebut, penutur lebih permisif pada mereka yang pulang kampung daripada yang mudik sebab mereka yang mudik dalam pemahaman penutur sebenarnya telah memiliki rumah di Jakarta dalam artian memiliki tempat tinggal yang layak daripada mereka yang disebut penutur pulang kampung. Penutur tidak membenarkan bahwa istilah mudik dan pulang kampung itu sama, tetapi lebih melihat kemungkinan tertular virus. Karena konsep mudik dan pulang kampung dari penutur berbeda dengan pemahaman mitra tutur maka tuturan penutur tampak taksa dan ambigu serta melanggar maksim cara. Penutur tidak mengonfirmasi bahwa bahwa istilah mudik dan pulang kampung sebenarnya sama, tetapi justru memberikan penjelasan tentang mudik dan pulang kampung versi penulis dalam hubungannya dengan potensi penulisan Covid-19 yang dapat terjadi. Hal ini menyebabkan munculnya informasi yang kabur, berlebihan, sehingga melanggar maksim cara (Grice, 1975: 47). Tuturan yang disampaikan penutur merupakan jenis tuturan direktif karena penutur meminta mitra tutur untuk melakukan tindakan dan menantang mitra tutur, seperti tampak dalam tuturan “*Coba dilihat juga di lapangan*” dan

“*Lebih bahaya mana?*”. Tuturan direktif disampaikan penutur untuk mendukung dan memperkuat argumen.

Simpulan

Setelah dilakukan penelitian dengan menggunakan teori dasar pragmatik tentang prinsip kerjasama dan fungsi tuturan, maka maksud perbincangan antara penutur dan mitra tutur dalam Gelar Wicara Mata Najwa Episode “Jokowi Diuji Pandemi” menjadi semakin jelas. Dalam gelar wicara tersebut terjadi penyimpangan prinsip kerjasama ketika penutur memberikan tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan mitra tutur. Hal ini dilakukan penutur untuk menjaga sopan santun, menjaga sikap netral dalam memberikan penilaian, atau untuk memberikan informasi yang lengkap kepada mitra tutur pun kepada masyarakat yang menyaksikan tayangan tersebut. Lewat penelitian ini ditemukan ada 3 bentuk penyimpangan prinsip kerjasama dan 4 fungsi tuturan. Temuan ini memudahkan penonton gelar wicara tersebut untuk memahami maksud tersirat yang tidak diungkapkan oleh penutur, terutama dalam memberikan informasi penting terkait keputusan-keputusan yang diambil oleh pemerintah selama pandemi.

Daftar Pustaka

- Astuti, Wiwik Dwi. 2017. “Implikatur Percakapan dalam Gelar Wicara Sentilan Sentilun di Metro TV”. *KANDAI*. Vol. 13 (2): 311-326.
- Grice, Herbert Paul. 1975. *Logic and Conversation dalam Peter Cole dan Jerry L. Morgan, Syntax and Semiotics Speech Acts*. New York: Academic Press.
- Leech, Geoffrey Neil. 1983. *Principles of Pragmatics*. London: Longman.
- Leech, Geoffrey Neil. 1993. *Prinsip-Prinsip Pragmatik (terj.)* Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Mahsun. 2005. *Metode Penelitian Bahasa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Manaf, Ngusman. Abdul. 2011. “Kesopanan Tindak Tutur Menyuruh dalam Bahasa Indonesia.” *Jurnal Litera*. Vol. 10 (3): 212-224.
- Haliko, Maryati. K. 2017. “Implikatur Percakapan dalam Talk Show Hitam Putih di Trans 7”. *Jurnal Bahasa dan Sastra*. Vol. 2 (1): 77 – 85.

- Handayani, Catur, dkk. 2014. “Implikatur Percakapan dalam Acara Talk Show Mata Najwa di Metro TV”. *Basastra Jurnal Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Pengajarannya*. Vol 2 (3): 1-14.
- Rohmadi, Muhammad. 2010. *Analisis Wacana Pragmatik*. Surakarta: Yuma Pustaka.
- Rustono. 1999. *Pokok-Pokok Pragmatik*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- Searle, John Rogers. 1969. *Speech Acts: An Essay in the Philosophy of Language*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Searle, John Rogers. “The Classification of Illocutionary Acts”. *Language in Society*. (5): 1-24.
- Sudaryanto. 2015. *Metode dan Aneka Teknik Analisis Bahasa*. Yogyakarta: Duta Wacana University
- Tarigan, Henry. Guntur. 1986. *Pengajaran Pragmatik*. Bandung: Angkasa
- Wahyuningsih, H dan Zainal Rafli. 2017. “Implikatur Percakapan dalam Stand up Comedy 4”. *Bahtera Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra*. Vol. Juli 2017: 139-153.